



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penyusunan LAKIP Tahun 2016**

LAKIP dibuat sebagai pertanggungjawaban Instansi Pemerintah selama satu tahun yang mengacu kepada Tap MPR RI Nomor : XI/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LAKIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur dimaksudkan sebagai Media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai Kinerja Instansi Pemerintah di Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi di Kabupaten Kutai Timur yang bermanfaat antara lain untuk :

- a. Mendorong Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai salah satu Instansi Pemerintah di Kabupaten Kutai Timur untuk menyelenggarakan tugas umum Pemerintah dan Pembangunan secara baik dan benar ( Good Governance ) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- b. Menjadikan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai salah satu Instansi Pemerintah di Kabupaten Kutai Timur yang akuntabel sehingga pelaksanaan tugas dilakukan secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat serta lingkungannya.
- c. Menjadi bahan masukan dan umpan balik bagi pihak – pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan Kinerja Instansi Pemerintah di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian.

### **1.2. Dasar Hukum**

Dasar Hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah :

1. Tap MPR RI Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme.



2. Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme.
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia No. 4286).
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor : 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4438)
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.
10. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2012 Nomor 1.14.01.00.00.5.1 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Dana Tugas Pembantuan TA 2012 Nomor : 0814/026-07.4.01/19/2012 Tanggal 09 Desember 2011 Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi.

### 1.3. IKHTISAR EKSEKUTIF

Menyajikan Ringkasan kinerja, kendala yang dihadapi, strategi pemecahan masalah.

## BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I meliputi Latar belakang, Bidang Kewenangan dan Perangkat Daerah, Isu stratejik yang paling berpengaruh, dasar hukum dan sistematika penyajian.



## **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Pada Bab II meliputi rencana stratejik yang berisi ringkasan Renstra, yaitu visi, Misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program serta perjanjian kinerja yang menyangkut rencana pencapaian target indikator sasaran.

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Pada Bab III meliputi hasil pencapaian sasaran-sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan hasil pengukuran kinerja kegiatan.

## **BAB IV PENUTUP**

Pada Bab IV meliputi Kesimpulan, Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja, Kendala dan Hambatan serta Strategi pemecahan.

## **LAMPIRAN –LAMPIRAN**

1. Rencana Stratejik
2. Pengukuran Kinerja Kegiatan
3. Pengukuran Pencapaian Sasaran
4. Rencana Kerja Tahunan
5. Progres Fisik dan Keuangan
6. Daftar Investasi Barang

### **1.4. Bidang Kewenangan dan Perangkat Daerah**

Berdasarkan Perda Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2009 dan Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2009, ditetapkan pula kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur sebagai berikut :

#### **1. KEWENANGAN**

Kewenangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur didasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Perundang undangan dibidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian yang berlaku serta Perda Nomor 31 Tahun 2000, yaitu :

1. Penyaluran dan Penempatan Tenaga Kerja
2. Perlindungan dan Penyelesaian Perselisihan Ketenagakerjaan



3. Pengembangan / Pelatihan Ketenagakerjaan
4. Pengawasan dan Pengendalian Ketenagakerjaan.
5. Perijinan.
6. Ketransmigrasian
7. Pengelolaan administratif.

## 2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur adalah :

### 1. Tugas Pokok

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah dan tugas pembantuan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi.

### 2. Fungsi

Sesuai tugas pokoknya maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program Dinas;
2. Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
3. Pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan tugas dibidang kesekretariatan; latihan dan pengembangan sumber daya tenaga kerja; penempatan tenaga kerja; pengawasan dan hubungan industrial; transmigrasi;
4. Pembinaan dan pengelolaan administrasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kearsipan;
5. Pelaksanaan tugas pembantuan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
6. Pemberian rekomendasi teknis untuk penerbitan perizinan oleh Dinas terkait;
7. Pengawasan dan pengendalian teknis pasca penerbitan perizinan;
8. Pembinaan unit pelaksana teknis dinas;
9. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja lain;
10. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
11. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

### 3. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan organisasi Disnakertrans Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Perda Kabupaten Kutai Timur Nomor : 2 Tahun 2009 terdiri dari :

- A. Kepala Dinas
- B. Sekretariat



- Sub. Bagian Perencanaan Program
  - Sub. Bagian Keuangan
  - Sub. Bagian Umum
- C. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja
- Seksi Perencanaan dan Informasi Pasar Kerja
  - Seksi Pelatihan dan Produktivitas
  - Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
- D. Bidang Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- Seksi Kelembagaan Hubungan Industrial dan Perselisihan
  - Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
  - Seksi Persyaratan Kerja
- E. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan
- Seksi Pengawasan Penyelesaian Kasus Tenaga Kerja
  - Seksi Pengawasan Norma Kerja
  - Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- F. Bidang Transmigrasi
- Seksi Penyiapan Permukiman
  - Seksi Penempatan
  - Seksi Pembinaan Masyarakat dan Kawasan

#### 4. SARANA DAN PRASARANA

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Sarana digunakan untuk pencapaian kegiatan operasional Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur. Barang/alat merupakan barang-barang inventaris kantor.

##### 1. Gedung dan Bangunan

Sampai akhir tahun 2015 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur menempati gedung kantor yang berada di Kawasan Pusat Pemerintahan Bukit Pelangi Sangatta. Status gedung adalah milik Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Selain bangunan gedung yang berada di Bukit Pelangi, terdapat 1 (satu) bangunan gedung Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja Mandiri adalah Unit Pelaksana Teknis Operasional Dinas di Bidang Pendidikan dan Pelatihan Ketenagakerjaan. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja mandiri dipimpin



oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sarana mobilitas dimaksud dalam hal ini adalah kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan dinas jabatan baik roda empat maupun roda dua sebagai inventaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur. Sampai dengan akhir tahun 2015, sarana mobilitas yang tercatat adalah sebagai berikut :

- Kendaraan Dinas operasional roda dua : 1 unit

## 2. Peralatan dan Perlengkapan

Peralatan dan Perlengkapan dimaksud dalam hal ini adalah peralatan dan perlengkapan pendukung operasional Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur, baik yang menunjang kelancaran administrasi maupun penunjang pekerjaan lainnya, terdiri dari :

### a. Peralatan Elektronik

Peralatan elektronik dimaksud dalam hal ini adalah berbagai alat yang menggunakan tenaga listrik dan/atau komponen elektronik. Sampai dengan akhir tahun 2015 secara global terdiri dari :

- Komputer PC : 2 unit
- Alat Penghancur Kertas : 2 unit
- Televisi : 2 unit
- Camera filem : 2 unit
- Handy Cam : 1 unit
- Printer : 7 unit

Berbagai peralatan dan/atau perlengkapan sebagaimana tersebut diatas dimuat secara general dengan tidak menyebutkan keterangan yang terperinci. Secara lengkap dan terperinci dimuat dalam daftar inventaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur.

## 5. SUMBER DAYA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

### 5.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2015 sebanyak 122 orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 69 orang serta Non PNS (PTT, TK2D dan Magang) sebanyak 53 orang. Gambaran komposisi aparatur menurut pendidikan dan kepangkatan secara rinci dapat dilihat dalam tabel 2.1 - 2.3.



Tabel : 2.1.

**Sumber Daya Manusia**  
**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur**

No	Uraian	Jumlah ( Orang )
1.	Jumlah Pegawai	122 Orang
2.	Kualitas Pendidikan :	
	- SD Sederajat	-
	- SMP Sederajat	-
	- SLTA Sederajat	43 Orang
	- D1 / D2 / D3 / D4	14 Orang
	- S1 Sederajat	57 Orang
	- S2 Sederajat	8 Orang
3.	Pangkat / Golongan :	
	- Golongan I	-
	- Golongan II	20 Orang
	- Golongan III	43 Orang
	- Golongan IV	6 Orang
4.	Jumlah Pejabat Struktural :	
	- Eselon I	-
	- Eselon II	1 Orang
	- Eselon III	5 Orang
	- Eselon IV	17 Orang
5.	Jumlah Pejabat Fungsional	2 Orang
6.	PTT / TK2D / Magang	53 Orang



--	--	--

**Tabel 2.2.**  
Komposisi PNS dan CPNS pada Unit Kerja berdasarkan Pangkat / Golongan dan Pendidikan

No	Jabatan	Pangkat/Gol.	Pendidikan
<b>A KEPALA DINAS</b>			
	Kepala Dinas	Pembina Utama Muda (IV/c)	S2
<b>B SEKRETARIAT</b>			
	Sekretaris	Pembina TK I (IV/b)	S2
<b>Sub Bagian Umum</b>			
1	Kasubag Umum & Kepegawaian	Penata Tk. I (III/d)	S1
2	Staf	Penata Muda Tk.I (III/b)	S1
3	Staf	Penata Muda (III/a)	S1
4	Staf	Peng.Muda Tk.I	SLTA
<b>Sub Bagian Perencanaan Program</b>			
1	Kasubag	Penata (III/d)	S1
2	Staf	Penata Muda Tk I (III/c)	S1
3	Staf	Pengatur Muda TK.I	SLTA
<b>Sub Bagian Keuangan</b>			
1	Kasubag	Penata (III/d)	S1
2	Bendahara Pengeluaran	Pengatur Muda (II/a)	S2
3	Staf	Penata Muda Tk I (III/b)	S2
4	Staf	Penata Muda (III/a)	S1
5	Staf	Pengatur Muda (II/b)	SLTA
<b>C BIDANG PELATIHAN DAN PENEMPATAN NAKER</b>			
	Kabid	Pembina (IV/a)	S2
<b>Sub Bidang Pelatihan &amp; Produktifitas</b>			
1	Kasi	Penata Tk (III/d)	S1
2	Staf	Penata Tk I(III/b)	S1
<b>Sub Bidang Perencana &amp; Informasi Pasar Kerja</b>			
1	Kasi	Penata (III/d)	S1
2	Staf	Penata Muda (III/b)	S2
3	Staf	Penata Muda (III/a)	S1
<b>Sub Bidang Penempatan &amp; Perluasan Kesempatan Kerja</b>			
1	Kasi	Penata Muda Tk.I (III/c)	S1
2	Staf	Pengatur Muda (II/a)	SLTA





No	Jabatan	Pangkat/Gol.	Pendidikan
<b>D</b>	<b>BIDANG TRANSMIGRASI</b>		
	Kabid	Pembina [IV/a]	S1
	<b>Sub Bidang Penyiapan Pemukiman</b>		
1	Kasi	Penata Tk I [III/d]	SLTA
2	Staf	Penata Muda [III/a]	S1
	<b>Sub Bidang Pembinaan Masyarakat &amp; Kawasan</b>		
1	Kasi	Penata [III/d]	S1
2	Staf	Penata Muda Tk.I [III/b]	S1
3	Staf	Pengatur Tk.I [II/d]	D3
4	Staf	Peng.Muda Tk.I [II/b]	SLTA
	<b>Sub Bidang Penempatan</b>		
1	Kasi	Penata [III/d]	SLTA
2	Staf	Pengatur Tk I [II/d]	D3
<b>E</b>	<b>BIDANG PENGAWAS KETENAGAKERJAAN</b>		
	Kabid	Pembina [IV/A]	S1
	<b>Sub Bidang Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja</b>		
1	Kasi	Penata [III/d]	S1
2	Staf	Penata Muda Tk.I [III/b]	S1
	<b>Sub Bidang Pengawasan Norma Kerja</b>		
1	Kasi	Penata [III/d]	S1
2	Staf	Pengatur [II/c]	SLTA
3	Staf	Pengatur [II/c]	D3
	<b>Sub Bidang Penyelesaian Kasus Ketenagakerjaan</b>		
1	Kasi	Penata [III/d]	S1
2	Staf	Penata Muda Tk I [III/b]	S1
3	Staf	Pengatur Muda [II/a]	SLTA
<b>F</b>	<b>BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMSOSTEK NAKER</b>		
	Kabid	Pembina [IV/a]	S1
	<b>Sub Bidang Pengupahan &amp; Jamsostek</b>		
1	Kasi	Penata Muda Tk. I [III/c]	S1
2	Staf	Penata Muda Tk.I [III/b]	S1
3	Staf	Penata Muda [III/a]	S1
	<b>Sub Bidang Kelembagaan HI &amp; Perselisihan</b>		
1	Kasi	Penata [III/d]	S1
2	Staf	Peng.Muda Tk.I [II/b]	SLTA
	<b>Sub Bidang Persyaratan Kerja</b>		
1	Kasi	Penata [III/d]	S1
<b>F</b>	<b>BALAI LATIHAN KERJA MANDIRI</b>		
1	Kepala	Penata Tk I [III/d]	S1



No	Jabatan	Pangkat/Gol.	Pendidikan
2	Kasubbag Umum	Penata Muda Tk I (III/b)	S1
3	Staf	Penata (III/c)	S2
4	Staf	Penata TK.I (III/b)	S1
5	Staf	Penata TK.I (III/b)	S1
6	Staf	Penata Muda (III/b)	S1
7	Staf	Pengatur Tk I (II/d)	D3
8	Staf	Pengatur Muda Tk I (II/b)	SLTA
9	Staf	Pengatur Muda Tk I (II/b)	SLTA
10	Staf	Pengatur Muda Tk I (II/b)	SLTA
11	Staf	Pengatur Muda Tk I (II/b)	SLTA
12	Staf	Pengatur Muda (II/a)	SLTA
13	Staf	Pengatur Muda (II/a)	SLTA
14	Staf	Pengatur Muda (II/a)	SLTA
15	Staf	Pengatur Muda (II/a)	SLTA
16	Staf	Pengatur Muda (II/a)	SLTA

Tabel. 2.3.  
Komposisi Pegawai Tidak Tetap (PTT, TK2D & Magang)  
Berdasarkan Pendidikan

No	Jabatan	Pendidikan (Bidang Studi)
<b>A</b>	<b>Sub Bagian Umum</b>	
1	Staf	D3
2	Staf	D3
3	Staf	D1
4	Staf	SLTA
5	Staf	SLTA
6	Staf	SLTA
7	Staf	SLTA
8	Staf	SLTA
9	Staf	SLTA
10	Staf	SLTA
11	Staf	SLTA
12	Staf	SLTA
13	Staf	SLTA
<b>B</b>	<b>Sub Bagian Perencanaan Program</b>	
1	Staf	S1
2	Staf	S1
3	Staf	SLTA
<b>C</b>	<b>BIDANG PELATIHAN DAN PENEMPATAN NAKER</b>	
1	Staf	D3
2	Staf	SLTA
3	Staf	SLTA
4	Staf	SLTA
5	Staf	SLTA
6	Staf	SLTA



D	BIDANG TRANSMIGRASI	
1	Staf	S1
2	Staf	S1
3	Staf	SLTA
4	Staf	SLTA
5	Staf	SLTA
6	Staf	SLTA
E	BIDANG PENGAWAS KETENAGAKERJAAN	
1	Staf	S1
2	Staf	S1
3	Staf	S1
4	Staf	D3
5	Staf	SLTA
F	BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMSOSTEK NAKER	
1	Staf	S1
2	Staf	SLTA
3	Staf	SLTA
4	Staf	SLTA
F	BALAI LATIHAN KERJA MANDIRI	
1	Staf	S1
2	Staf	S1
3	Staf	S1
4	Staf	S1
5	Staf	D3
6	Staf	SLTA
7	Staf	SLTA
8	Staf	SLTA
9	Staf	SLTA
10	Staf	SLTA
11	Staf	SLTA
12	Staf	SLTA
13	Staf	SLTA
14	Staf	SLTA
15	Staf	SLTA
16	Staf	SLTA
17	Staf	SLTA
18	Staf	SLTA

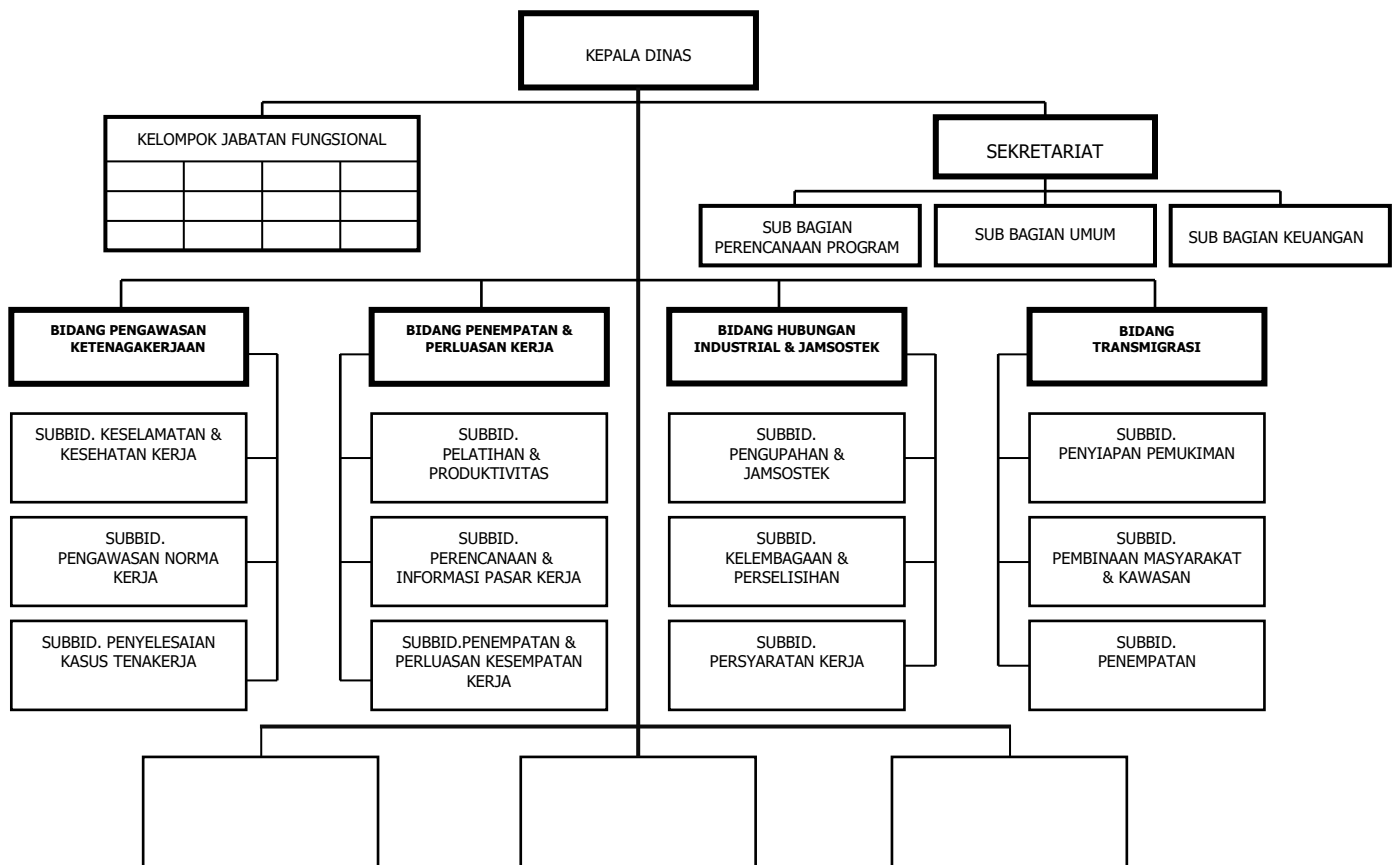
Dari Tabel diatas ditinjau dari aspek Sumber Daya Manusia dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Penempatan pejabat struktural masih terdapat yang belum sesuai dengan kompetensi dan keahliannya;
- Kurangnya staf golongan III yang memiliki kemampuan dalam mendukung bidang tugas yang ditangani;



Bagan Struktur Organisasi Disnakertrans Kabupaten Kutai Timur sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN KUTAI TIMUR**



**5.2 Isu Strategik yang berpengaruh**

Isu dan Masalah strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015 adalah :

1. Masih tingginya angka pengangguran yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan
2. Rendahnya kompetensi angkatan kerja sehingga tidak memenuhi persyaratan yang di minta oleh pemberi kerja
3. Hubungan Industrial masih banyak yang belum kondusif sehingga memunculkan terjadinya perselisihan antara karyawan dan pengusaha
4. Masih kurangnya pemahaman masyarakat, pengusaha, dan pekerja terhadap peraturan tentang ketenagakerjaan



5. Belum maksimalnya pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan sehingga masih terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat normatif
6. Berkurangnya wilayah/lokasi transmigrasi karena keterbatasan lahan khusus diperuntukan bagi transmigran
7. Munculnya konflik kepentingan dalam mempergunakan tata ruang wilayah yang berkaitan dengan transmigrasi
8. Belum terkoordinasinya program pengembangan ketransmigrasian sehingga belum dapat dicapai sinkronisasi dalam pembangunan daerah secara makro



## BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### 2.1. Rencana Strategik

Perencanaan stratejik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana stratejik instansi pemerintah yang setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, kebijakan dan Program serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan stratejik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan Stratejik lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, melalui pendekatan perencanaan stratejik yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur memberikan pedoman dalam melaksanakan pembangunan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi selama kurun waktu 2010 sampai dengan 2015.

#### 2.1.1 VISI dan MISI

- 1). **VISI** Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur, Yaitu :  
“Pembangunan Tenaga Kerja dan Masyarakat Transmigrasi yang maju, Produktif dan Mandiri menuju tercapainya peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kutai Timur”
- 2). **Misi** Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur



- a. Meningkatnya kualitas tenaga kerja untuk mencapai profesionalisme sumber daya manusia
- b. Meningkatnya kualitas dan perluasan penempatan tenaga kerja sesuai kemampuan, bakat dan minat dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi dan perlindungan hukum
- c. Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan untuk terciptanya peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan kemajuan dunia usaha
- d. Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja beserta keluarganya
- e. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan peraturan ketenagakerjaan
- f. Meningkatkan kualitas masyarakat transmigrasi sebagai sumber tenaga kerja produktif dan mandiri
- g. Meningkatkan pengembangan kawasan transmigrasi sebagai senta pertumbuhan ekonomi

## 2.1.2 TUJUAN dan SASARAN

### 1). TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dan merupakan implementasi dari Misi Dinas.

Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam merealisasikan Misi. Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut maka Disnakertrans Kabupaten Kutai Timur telah menetapkan Tujuan sebagai berikut :

1. Peningkatan Profesionalisme dan kinerja aparatur Disnakertrans dalam melaksanakan otonomi daerah bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian
2. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat
3. Peningkatan kualitas tenaga kerja melalui kebijakan peningkatan SDM maupun melalui kerjasama dengan stake holder.
4. Peningkatan dan perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha.
5. Pengembangan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan untuk terciptanya kesejahteraan tenaga kerja dan kemajuan dunia usaha.
6. Peningkatan pelayanan prima kepada pengusaha dan karyawan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
7. Peningkatan kepesertaan jamsostek bagi tenaga kerja sektor formal dan informal.



8. Peningkatan dan pengembangan peranan SP/SB dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan.
9. Optimalisasi pelaksanaan dan penerapan sistem manajemen K3 pada perusahaan.
10. Peningkatan penegakan hukum bidang ketenagakerjaan
11. Peningkatan kerjasama dengan stake holder dalam rangka pengawasan dan penegakan peraturan ketenagakerjaan.
12. Peningkatan pengelolaan kawasan transmigrasi.
13. Peningkatan dan perluasan usaha masyarakat transmigrasi.
14. Peningkatan kerjasama dengan stake holder dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat kawasan transmigrasi.

## 2). SASARAN

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur dalam jangka waktu 5 tahun yang terbagi dalam kurun waktu tahunan sesuai penentuan APBD. Dari sasaran inilah LAKIP mulai dapat diukur karena sasaran sebagai dasar untuk mengendalikan dan mengukur Kinerja Organisasi. Sasaran yang ingin dicapai oleh Disnakertrans Kabupaten Kutai Timur, yaitu :

1. Terwujudnya kompetensi aparatur disnakertrans yang profesional;
2. Tercapainya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
3. Terselenggaranya urusan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sesuai prinsip good governance;
4. Tersusunnya standar kinerja dan SOP bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
5. Terwujudnya pelayanan yang berbasis online;
6. Terlaksananya kegiatan pengendalian pelaksanaan pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
7. Terwujudnya peningkatan ketrampilan tenaga kerja
8. Tercapainya peningkatan kesiapan calon tenaga kerja menyesuaikan dengan bursa tenaga kerja;
9. Terbukanya peluang kerja dan mengembangkan sistem informasi ketenagakerjaan
10. Tercapainya peningkatan koordinasi dengan pengusaha dalam peningkatan kapasitas tenaga kerja;
11. Tercapainya peningkatan kewirausahaan masyarakat;
12. Terwujudnya peningkatan kemudahan dalam memperoleh pekerjaan dan berusaha;





13. Tercapainya kerjasama dengan dunia usaha dalam peningkatan ketrampilan dan keahlian tenaga kerja;
14. Terwujudnya peningkatan pemahaman peraturan bidang ketenagakerjaan bagi pengusaha, SP/SB, dan karyawan;
15. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan karyawan melalui peningkatan produktivitas;
16. Terwujudnya peranan SP/SB dalam pengembangan perekonomian anggota;
17. Terwujudnya peran lembaga ketenagakerjaan dalam mengantisipasi dan menyelesaikan perselisihan hubungan industrial;
18. Terwujudnya penurunan perselisihan hubungan industrial;
19. Tercapainya peningkatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui perjanjian bersama (PB);
20. Terwujudnya peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam mengantisipasi timbulnya perselisihan hubungan industrial;
21. Terwujudnya sosialisasi program jamsostek bagi tenaga kerja sektor formal dan informal;
22. Tercapainya peningkatan kepesertaan program jamsostek bagi tenaga kerja sektor formal dan informal;
23. Terwujudnya peningkatan pelayanan klaim jamsostek berkaitan dengan tupoksi institusi disnakertrans
24. Terwujudnya peningkatan kepesertaan karyawan dalam SP/SB;
25. Terwujudnya peningkatan peran SP/SB dalam perlindungan para anggotanya;
26. Tercapainya peningkatan peran SP/SB di bidang perekonomian dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya;
27. Terwujudnya perlindungan karyawan terhadap potensi bahaya K3;
28. Terwujudnya penurunan kasus kecelakaan kerja;
29. Tercapainya peningkatan penerapan sistem manajemen K3 pada perusahaan;
30. Terwujudnya peningkatan dan pengawasan norma ketenagakerjaan;
31. Tercapainya pengesahan, pemeriksaan, dan pengujian peralatan perusahaan;
32. Terwujudnya penindakan hukum dan tertanganinya kasus di bidang ketenagakerjaan;
33. Terwujudnya kerjasama dengan intitusi lain dalam rangka mengurangi timbulnya permasalahan bidang ketenagakerjaan;
34. Terwujudnya aparaturnya pengawasan ketenagakerjaan yang profesionalisme;
35. Tersedianya peralatan untuk pemeriksaan dan pengujian peralatan produksi perusahaan;
36. Terwujudnya SDM produktif dan memiliki ketrampilan handal di bidang pertanian;
37. terselesaikannya permasalahan berkaitan dengan pengelolaan lahan;
38. Terpenuhinya pelayanan kepada masyarakat transmigrasi;



39. Terwujudnya kesiapan masyarakat transmigrasi megembangkan usaha;
40. Terwujudnya kelembagaan ekonomi pada masyarakat transmigrasi;
41. Terwujudnya kerjasama dengan investor dalam mengembangkan ekonomi masyarakat transmigrasi;
42. Terwujudnya peningkatan kerjasama dengan daerah pengirim dalam meningkatkan kualitas transmigrasi;
43. Tercapainya peningkatan perhatian pemerintah pusat terhadap kawasan transmigrasi di Kabupaten Kutai Timur;

### 2.1.3 Kebijakan dan Program

Untuk melaksanakan kebijakan dan program, dilakukan sesuai dengan Kebijakan Umum Anggaran Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Adapun Kebijakan dan Program sesuai Renstra Disnakertrans Kab. Kutai Timur 2010- 2015 adalah sebagai berikut :

#### ❖ Kebijakan

1. Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah

Dilaksanakan dengan :

#### **Program**

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

#### ❖ Kebijakan

2. Pembangunan Etos Kerja dan Produktivitas

Dilaksanakan dengan :

#### **Program :**

1. Peningkatan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Informasi Ketenagakerjaan
2. Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
3. Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Hubungan Industri dengan Serikat Pekerja

#### ❖ Kebijakan

3. Pengendalian Penduduk, Penanggulangan Kemiskinan, dan Pengangguran

Dilaksanakan dengan :

#### **Program :**

1. Pembukaan, Pengembangan dan Pemberdayaan Wilayah Transmigrasi



❖ Kebijakan

4. Mengembangkan sistem mekanisme antar kerja untuk meningkatkan penempatan tenaga kerja sektor formal, meningkatkan peran pengusaha dalam meningkatkan ketrampilan dan keahlian karyawan

Dilaksanakan dengan :

**Program :**

1. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja ( BLK Mandiri )
1. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja ( BLKM Sangatta )

**1.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2015**

Perjanjian kinerja atau penetapan kinerja yang merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian kinerja memuat pernyataan yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama Dinas beserta target kinerja dan anggaran.

Untuk lebih jelas perjanjian kinerja/penetapan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai timur Tahun 2015, sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Terselenggaranya Administrasi Keuangan SKPD	12 Bulan	- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	919.500.000
	- Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah	12 Bulan	- Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi di Dalam dan Luar Daerah	605.000.000
	- Meningkatnya pelayanan operasional yang baik pada Disnakertrans	12 Bulan	- Penyediaan Pelayanan Operasional Kantor	368.513.125
	- Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran BLKM	12 Bulan	- Pelayanan Administrasi Perkantoran ( BLKM	480.859.700
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	- Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	12 Bulan	- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	328.790.000
	- Terpeliharanya gedung kantor BLKM	2 Unit	- Pemeliharaan gedung kantor BLKM	1.140.240.300
Peningkatan Disiplin Aparatur	- Adanya pakaian Adat beserta Perlengkapannya	23 Orang	- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	54.100.000
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	- Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan baik SKPD	12 Bulan	- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	350.300.000



Peningkatan Kesempatan kerja dan Pengembangan Informasi Ketenagakerjaan	- Tersediannya Informasi ketenagakerjaan yang dapat diketahui oleh masyarakat	1000 Orang	- Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	50.000.000
	- Adanya Validasi Data Perusahaan Pengguna Tenaga Asing dan Tenaga Kerja Asing di Kutai timur	1000 Orang	- Pembinaan dan Monitoring Pengguna Tenaga Kerja Asing	100.000.000
	- Pencari Kerja dan Pemberi Kerja dengan mudah mendapatkan informasi	1000 Orang	- Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Bursa Kerja (Online dan Manual)	50.000.000
	- Tersedianya Tenaga Kerja yang trampil dan siap pakai	1000 Orang	- Pelatihan Kerja Berbasis Masyarakat	100.000.000
Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	- Pemahaman Perusahaan dan Pekerja akan Keselamatan Kerja di Tempat Kerja	30 Perusahaan	- Peringatan Bulan K3 dan Sosialisasi K3 se Kabupaten Kutai Timur	75.000.000
	- Banyaknya perusahaan yang menciptakan perusahaan pembina tenaga kerja perempuan	30 Perusahaan	- Penilaian Perusahaan Terbaik Pembina Tenaga Kerja Perempuan	50.000,00
	- Meningkatnya pengetahuan tentang bahayanya HIV/AIDS	30 Perusahaan	- Sosialisasi Kepmenakertrans No.68 Tahun 2004 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di tempat Kerja	50,000,000
	- Meningkatnya pemahaman norma kerja perempuan	30 Perusahaan	- Sosialisasi Norma Kerja	50.000.000
Pembukaan, Pengembangan dan Pemberdayaan Wilayah Transmigrasi	- Terbinanya masyarakat transmigrasi dan Penduduk sekitar	12 Bulan	- Pembinaan dan Pemberdayaan serta Pengembangan Permukiman Transmigrasi	100.000.000
	- Terjalannya kerja sama antar daerah pengirim dan penerima transmigrasi	12 Bulan	- Pengembangan dan Perencanaan Kerjasama Antar Daerah (KSAD)	100.000.000
	- Tertatanya lahan transmigrasi di Kabupaten Kutai Timur	12 Bulan	- Inventarisasi Pembagian dan Sertifikasi Lahan dan Pengukuran Batas UPT	100.000.000
Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Hubungan Industri dengan Serikat Pekerja	- Terwujudnya kepastian hukum yang sesuai dengan harapan kerja	12 Bulan	- Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kerja serta Penyelesaian Kasus	75.000.000
	- Keterwakilan Pekerja, Pengusaha dan Pemerintah yang Duduk di Lembaga Hubungan Industri	12 Bulan	- Pemberdayaan Dewan Ketenagakerjaan	223.536.500
	- Diperolehnya data kebutuhan hidup layak untuk pekerja	12 Bulan	- Survey Kebutuhan Hidup Layak(KHL)	104.160.375
Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja (BLKI Mandiri)	- Tersedianya tenaga kerja yang terampil	12 Bulan	- Pendidikan dan Pelatihan bagi pencari kerja Kejuruan Menjahit	250.000.000



## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1. Pengukuran Kinerja

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Inpres No. 7 Tahun 1999, Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur diukur berdasarkan tingkat pencapaian kinerja sasaran dan program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran, program/kegiatan dilakukan melalui media rencana kinerja yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya, pencapaian kinerja sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari masukan (*Inputs*), keluaran (*Outputs*), hasil (*Outcomes*).

Media Pengukuran Kinerja terdiri dari :

- Formulir PKK (Pengukuran kinerja Kegiatan)
- Formulir PPS ( Pengukuran Pencapaian Sasaran)

Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian Sasaran Strategis Kabupaten Kutai Timur dan sebab-sebab tercapai dan tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Selanjutnya untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran, program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan penggunaan makna dari nilai yang diperoleh sebagai berikut :

### SKALA PENILAIAN

SKALA NILAI	KATEGORI PENILAIAN
>100	Sangat Baik
80 – 100	Baik
60 – 79	Cukup
40 – 59	Kurang
< 40	Sangat Kurang



### **Indikator Kinerja**

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan tertentu.

### **Indikator Sasaran**

Indikator sasaran adalah sesuatu yang menunjukkan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator sasaran dilengkapi dengan target kuantitatif dan satuannya untuk memudahkan pengukuran pencapaian sasaran.

### **Indikator Kinerja Kegiatan**

Indikator kinerja kegiatan adalah sesuatu yang menunjukkan pencapaian kinerja kegiatan. Indikator Kinerja kegiatan di kelompokkan ke dalam :

- **Kelompok Indikator Masukan (*Inputs*)**, adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan Output, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya
- **Kelompok Indikator Keluaran (*Outputs*)**, adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan
- **Kelompok Indikator Hasil (*Outcomes*)**, adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. *Outcomes* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

### **Pencapaian Kinerja dalam prosentase dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :**

- a. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian Rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- b. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :



$$\text{Persentase pencapaian Rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi-Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

### Pencapaian Kinerja Sasaran, Kegiatan dan Indikator Makro Bidang Pendidikan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2015, secara umum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang direncanakan. Rincian tingkat capaian kinerja sasaran, kegiatan dan indikator makro bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi tersebut diilustrasikan dalam lampiran PKK dan PPS.

### 3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2015, secara umum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang direncanakan. Rincian tingkat capaian kinerja sasaran, adalah sebagai berikut :

#### 1. Dokumen perencanaan dan pelaporan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang akurat

No	Indikator Kegiatan	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2015	Realisasi Tahun 2015		
					Target	Realisasi	Persentase
	Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian	Program	Kegiatan	23	23	23	100 %

Sebagai bahan acuan perencanaan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian maka dilaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang dilaksanakan di 18 Kecamatan.

#### 2. Membuka kesempatan kerja dan produktivitas pekerja



Indikator Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	%
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Orang	40	40	100
Pembinaan dan Monitoring Pengguna Tenaga Kerja Asing	Perusahaan	20	16	80
Peningkatan Pelayanan Penyelenggara Bursa Kerja (Online dan Manual)	Orang	1000	2052	205
Pelatihan kerja berbasis Masyarakat	Orang	10	10	100
Pelatihan BLKM : 1. Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pencari Kerja Kejuruan Menjahit	Orang	12	12	100

Pencapaian kinerja sebesar 100 % dengan nilai kategori baik tersebut dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan diselenggarakan dengan target yang diharapkan 40 orang peserta dengan realisasi 40 orang jadi persentase yang yang dicapai 100 %.
- b. Pembinaan dan Monitoring Pengguna Tenaga Kerja Asing target yang ingin dicapai 20 Perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dengan realisasi 16 Perusahaan yang telah dilakukan pembinaan dan monitoring, jadi persentase yang dicapai 80 %.
- c. Peningkatan Pelayanan Penyelenggara Bursa Kerja (Online dan Manual) target yang ingin dicapai 1000 orang pencari kerja, dengan realisasi 2052 orang pencari kerja, jadi persentase yang dicapai 205 %.
- d. Pelatihan yang di selenggarakan Balai Latihan Kerja mandiri (BLKM) : Pendidikan dan Pelatihan bagi Pencari Kerja Kejuruan Menjahit dengan target peserta sebanyak 12 orang, dengan realisasi peserta pelatihan sebanyak 12 orang peserta jadi persentase yang dicapai 100 %.





## 2. Melindungi hak-hak pekerja

Indikator Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	%
Peringatan Bulan K3 dan Sosialisasi se Kabupaten Kutai Timur	Perusahaan	100	100	100
Penilaian perusahaan terbaik pembina tenaga kerja perempuan	Orang	10	10	100
Sosialisasi Kepmenakertrans No.68 Tahun 2004 tentang pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja	Orang	30	40	133
Sosialisasi Norma Ketenagakerjaan	Orang	25	40	160
Pembinaan dan Pengawasan kerja serta penyelesaian kasus	Kasus	50	12	24
Pemberdayaan Dewan ketenagakerjaan	Dewan	3	3	100
Survey kebutuhan hidup layak ( KHL )	Kecamatan	3	3	100

Pencapaian sasaran melindungi hak-hak pekerja dilaksanakan melalui kegiatan pengawasan dan penegakan hukum norma kerja, pembinaan hubungan industrial dan pengembangan kelembagaan ketenagakerjaan, dan pemilihan perusahaan pembina keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan pengembangan lembaga K3, dengan hasil capaian 100 % baik.

## 4. Menempatkan sumberdaya manusia dan memanfaatkan sumberdaya kawasan



Indikator Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	%
Pembinaan dan pemberdayaan serta pengembangan pemukiman transmigrasi	UPT	3	100	100
Monitoring dan Pendataan Transmigrasi sampai dengan Pengakhiran Status UPT	UPT	3	100	100
Inventarisasi Pembagian dan sertifikasi Lahan	Kecamatan	4	100	100

Penempatan Transmigrasi menurut UPT dan Daerah Asal terdapat di SP3 Tahun 2007, SP7 Tahun 2008 dan Meratak 2010. Untuk SP3, SP7, dan Meratak masih dalam masa pembinaan. Sedang lokasi pen jajagan Daerah penerima Transmigrasi adalah Kecamatan Telen, Kecamatan Busang, Kecamatan Sandaran, Kecamatan Muara Ancalong, dan Kecamatan Karang dengan hasil kinerja yang dicapai 100 % baik.

### 3.3. Akuntabilitas Keuangan

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2015 mengalokasikan belanja sebesar Rp.12.402.395.316.00,- yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp.6.677.395.316.00,- dan belanja langsung sebesar Rp 5.725.000.000.00,- . Dan Anggaran belanja langsung tersebut digunakan untuk 23 kegiatan dari 9 program, selanjutnya dirasionalisasi melalui APBD-P Tahun Anggaran 2015 pertanggal 9 Oktober 2015 sebesar Rp. 13.237.625.884,00 yang terdiri dari belanja tidak langsung Rp.7.122.625.884.00,- dan belanja langsung sebesar Rp. 6.125.000.000.00,-.

Realisasi Belanja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Kutai Timur pada tahun 2015 sebesar Rp. 12.897.120.743,00,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.6.946.066.333,00,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 5.951.054.410,00,- Tingkat Presentase capaian kinerja keuangan pada tahun 2015 mencapai sebesar 97,43% yang terdiri dari belanja tidak langsung 97,65% dan belanja langsung 97,16% dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Penggunaan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung selama tahun 2015 sebagai berikut :

No.	Nama Program / Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi s/d Bulan Desember 2015	Sisa	% Keuangan	% Fisik
1	2	3	5	6	7	8
I	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b><u>7.112.625.884,00</u></b>	<b><u>6.946.006.333,00</u></b>	<b><u>166.559.551,00</u></b>	<b><u>97.65</u></b>	<b><u>100.00</u></b>
	- Belanja Pegawai	7.112.625.884,00	6.946.006.333,00	166.559.551,00	97.65	100.00



<b>II</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b><u>6.125.000.000,00</u></b>	<b><u>5.951.054.410,00</u></b>	<b><u>173.945.590,00</u></b>	<b><u>97.16</u></b>	<b><u>98.51</u></b>
<b>1.</b>	<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b><u>2.373.872.825,00</u></b>	<b><u>2.301.922.519,00</u></b>	<b><u>71.950.306,00</u></b>	<b><u>96.97</u></b>	<b><u>96.97</u></b>
	1. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	919.500.000,00	886.487.000,00	33.013.000,00	96.41	96.41
	2. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan Luar Daerah	605.000.000,00	604.538.450,00	461.550,00	99.92	99.92
	3. Penyediaan Pelayanan Operasional Kantor	368.513.125,00	366.435.769,00	2.077.356,00	99.44	99.44
	4. Pelayanan Administrasi Perkantoran (BLKM)	480.859.700,00	444.461.300,00	36.398.400,00	92.43	92.43
<b>2.</b>	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b><u>1.469.030.300,00</u></b>	<b><u>1.433.603.136,00</u></b>	<b><u>35.427.164,00</u></b>	<b><u>97.59</u></b>	<b><u>97.59</u></b>
	1 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	328.790.000,00	302.914.136,00	25.875.864,00	92.13	92.13
	2 Pemeliharaan Gedung Kantor BLKIM	1.140.240.300,00	1.130.689.000,00	9.551.300,00	99.16	99.16
<b>3.</b>	<b>Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b><u>54.100.000,00</u></b>	<b><u>53.364.000,00</u></b>	<b><u>736.000,00</u></b>	<b><u>98.64</u></b>	<b><u>98.64</u></b>
	1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	54.100.000,00	53.364.000,00	736.000,00	98.64	98.64
<b>4.</b>	<b>Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b><u>484.305.000,00</u></b>	<b><u>477.476.000,00</u></b>	<b><u>6.829.000,00</u></b>	<b><u>98.59</u></b>	<b><u>98.59</u></b>
	1 Penyusunan laporan Capaian Kinerja Dan Ikhisasr Realisasi Kinerja SKPD	484.305.000,00	477.476.000,00	6.829.000,00	98.59	98.59
<b>5.</b>	<b>Peningkatan Kesempatan Kerja dan Pembangunan Informasi Ketenagakerjaan</b>	<b><u>425.000.000,00</u></b>	<b><u>387.953.480,00</u></b>	<b><u>37.046.520,00</u></b>	<b><u>91.28</u></b>	<b><u>91.28</u></b>
	1 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	50.000.000,00	42.525.500,00	7.474.500,00	85.05	85.05
	2 Pembinaan dan Monitoring Pengguna Tenaga Kerja Asing	225.000.000,00	217.613.000,00	7.387.000,00	96.72	96.72
	3 Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Bursa Kerja (Online dan Manual)	50.000.000,00	43.553.680,00	6.446.320,00	87.11	87.11
	4 Pelatihan Kerja Berbasis Masyarakat	100.000.000,00	84.261.300,00	15.738.700,00	84.26	84.26
<b>6.</b>	<b>Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan</b>	<b><u>225.000.000,00</u></b>	<b><u>216.101.550,00</u></b>	<b><u>8.898.450,00</u></b>	<b><u>96.05</u></b>	<b><u>96.05</u></b>
	1 Peringatan Bulan K3 dan Sosialisasi K3 se Kabupaten Kutai Timur	75.000.000,00	72.119.400,00	2.880.600,00	96.16	96.16
	2 Penilaian Perusahaan Terbaik Pembina Tenaga Kerja Perempuan	50.000.000,00	48.494.250,00	1.505.750,00	96.99	96.99
	3 Sosialisasi Kepmenakertrans No.68 Tahun 2004 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja	50.000.000,00	48.275.000,00	2.788.000,00	94.42	94.42
	4 Sosialisasi Norma Kerja	50.000.000,00	48.275.900,00	1.724.100	96.55	96.55
<b>8.</b>	<b>Pembukaan , Pengembangan dan Pemberdayaan Wilayah Transmigrasi</b>	<b><u>440.995.000,00</u></b>	<b><u>435.600.500,00</u></b>	<b><u>5.394.500,00</u></b>	<b><u>98.78</u></b>	<b><u>99.78</u></b>
	1 Pembinaan dan Pemberdayaan serta pengembangan Pemukiman Transmigrasi	100.995.000,00	100.332.300,00	662.700,00	99.34	99.34
	2 Pengembangan dan Perencanaan Kerjasama Antar Daerah (KSAD)	240.000.000,00	238.105.900,00	1.894.100,00	99.21	99.21
	3 Inventarisasi Pembagian dan Sertifikasi Lahan dan Pengukuran Batas UPT	100.000.000,00	97.162.300,00	2.837.700,00	97.16	97.16
<b>9.</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Hubungan Industri dengan Serikat Pekerja</b>	<b><u>402.696.875,00</u></b>	<b><u>398.715.775,00</u></b>	<b><u>3.981.100,00</u></b>	<b><u>99.01</u></b>	<b><u>99.01</u></b>



Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur

	1	Pembinaan dan Pengawasan Kerja serta Penyelesaian Kasus Pemberdayaan Dewan	75.000.000,00	71.307.050,00	3.692.950,00	95.08	95.08
	2	Ketenagakerjaan Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL)	223.536.500,00	223.381.100,00	155.400,00	99.93	99.93
	3		104.160.375,00	104.027.625,00	132.750,00	99.87	99.87
<b>10.</b>		<b>Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja ( BLK sangatta )</b>	<b>250.000.000,00</b>	<b>246.317.450,00</b>	<b>3.682.550,00</b>	<b>98.53</b>	<b>98.53</b>
	1	Pendidikan dan Pelatihan bagi Pencari Kerja Kejuruan Menjahit	250.000.000,00	246.317.450,00	3.682.550,00	98.53	98.53
<b>TOTAL</b>			<b>6.125.000.000,00</b>	<b>5.951.054.410,00</b>	<b>173.945.950,00</b>	<b>97.16</b>	<b>97.16</b>

Penggunaan Belanja Tahun 2015 / Kegiatan Dana Tugas Pembantuan Pusat sebagai berikut :

No.	Nama Program/ Kegiatan	Target Awal	Realisasi	Sisa	% Keuangan	% Fisik
<b>I</b>	<b>Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja</b>	<b>554,638,000</b>	<b>548,243,000</b>	<b>6,395,000</b>	<b>98.85</b>	<b>1.15</b>
	1. Padat Karya Infrastruktur Kerja (I)	252,650,000	251,036,000	1,614,000	45.26	0.64
	2. Padat Karya Infrastruktur Kerja (II)	252,650,000	247,869,000	4,781,000	42.33	1.9
	3. Administrasi Kegiatan	49,338,000	49,338,000	-	8.90	-
<b>II</b>	<b>Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan</b>	<b>88,200,000</b>	<b>83,253,000</b>	<b>4,947,000.0</b>	<b>94.4</b>	<b>5.6</b>
	1. Administrasi Kegiatan	29,000,000	29,000,000	-	100.00	-
	2. Penyusunan Program dan Rencana Kerja/ Teknis/Program	26,550,000	21,603,000	4,947,000	81.37	19
	3. Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat ( Pemeriksaan Kasus Kecelakaan Kerja dan PAK )	32,650,000	32,650,000	-	100.00	-
<b>TOTAL</b>		<b>642,838,000</b>	<b>631,496,000</b>	<b>6,395,000</b>	<b>98.24</b>	<b>97.67</b>

### 3.4. Analisis Efisiensi dan Efektivitas

Analisis Efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara output dan input baik untuk rencana maupun realisasi. Sedangkan Analisis Efektivitas dilakukan dengan membandingkan antara outcome dengan output baik untuk rencana realisasi yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara sasaran dengan hasil (outcomes). Hasil analisis efisiensi dan efektivitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Kegiatan	Sub. Dinas	Presentase Capaian					
		Input	Output	Outcome	Efisiensi	Efektifitas	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Penyediaan Jasa	Sekretariat	99,51	99,67	99,67	99,59	99,67



Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur

Administrasi Keuangan							
2.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan Luar Daerah	Sekretariat	92,63	100	100	96,32	100
3.	Penyediaan Pelayanan Operasional Kantor	Sekretariat	98,30	100	100	99,15	100
4.	Pelayanan Adiministrasi Perkantoran ( BLKM )	BLKIM	99,60	99,81	99,81	99,71	99,81
5.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Sekretariat	98,86	100	100	99,43	100
6.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Sekretariat	98,30	99,00	99,00	98,65	99,00
7.	Pemeliharaan Gedung Kantor BLKIM	BLKIM	97,29	100	100	98,65	100
8.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional BLKIM	BLKM	100	100	100	100	100
9.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantro BLKIM	BLKIM	73,94	73,94	73,94	73,94	73,94
10.	Pengadaan Pakaian Dinas berserta Perengkapannya BLKIM	BLKIM	90,84	100	100	95,42	100
11.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Sekretariat	99,74	99,74	99,74	99,74	99,74
12.	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Disnakertrans	Sekretariat	88,84	100	100	94,42	100
13.	Pembuatan Profil Disnakertrans Kutim	Sekretariat	90,50	97,15	97,15	93,83	97,15
14.	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Sekretariat	96,43	100	100	98,22	100
15.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sekretariat	90,61	100	100	95,31	100
16.	Padat Karya Peningkatan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Umum	PPTK	93,60	98,00	98,00	95,80	98,00
17.	Penyelenggaraan Bursa Kerja Online	PPTK	89,84	100	100	94,92	100
18.	Pembuatan PERDA Tentang Retribusi Perpanjangan IMTA	PPTK	96,68	98,08	98,08	97,38	98,08
19.	Perencanaan Tenaga kerja/Pengumpulan, Update dan Analisis Data tenaga kerja	PPTK	93,03	98,11	98,11	95,57	98,11
20.	Sosialisasi Norma Kerja Perempuan	Pengawasan	92,62	100	100	96,31	100
21.	Peringatan Bulan K3 dan Sosialisasi K3 se Kabupaten Kutai Timur	Pengawasan	85,93	90,05	90,05	87,99	90,05
22.	Penilaian Perusahaan terbaik Pembina Tenaga Kerja Perempuan	Pengawasan	95,81	100	100	97,91	100
23.	Sosialisasi Kepmenakertrans No 68 Tahun 2004 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja	Pengawasan	97,14	100	100	98,57	100
24.	Pembinaan dan pemberdayaan serta Pengembangan	Transmigrasi	77,91	78,08	78,08	74,00	78,08



	Permukiman Transmigrasi						
25.	Monitoring dan Pendataan Transmigrasi sampai dengan Pengakhiran status UPT	Transmigrasi	86,84	100	100	93,42	100
26.	Inventarisasi Pembagian dan Sertifikasi Lahan	Transmigrasi	88,74	96,25	96,25	92,50	96,25
27.	Monitoring dan Evaluasi syarat Kerja	HIJ	96,12	100	100	98,06	100
28	Pembinaan dan pengawasan Ketenagakerjaan serta Penyelesaian Kasus	Pengawasan	90,53	100	100	95.27	100
29	Penyelesaian Kasus PHI/PHK	HIJ	96,83	99,50	99,50	98,17	99,50
30..	Perberdayaan Dewan Ketenagakerjaan	HIJ	97,43	100	100	98,72	100
31.	Pemetaan Bentuk-Bentuk Pekerja Terburuk untuk Anak	Pengawasan	76,37	96,23	96,23	96,30	96,23
32.	Survey Kebutuhan Hidup(KHL)	HIJ	96,51	100	100	98,26	100
33.	Penilaian Zero Accident dan System Manajemen K3	Pengawasan	96,83	99,50	99,50	98,17	99,50
34.	Sosialisasi UU Ketenagakerjaan	HIJ	90,53	100	100	95.27	100
35.	Pendidikan dan Pelatihan bagi pencari Kerja Kejuruan Otomotif (Kendaraan Ringan)	BLKM	99,01	100	100	99.51	100
36.	Pendidikan dan pelatihan bagi Pencari Kerja Kejuruan Las	BLKM	99,07	100	100	99,54	100
37.	Pendidikan dan Pelatihan bagi Pencari Kerja Kejuruan Otomotif (Sepeda Motor)	BLKM	99,13	100	100	99,57	100
38.	Pendidikan dan Pelatihan bagi Pencari Kerja Kejuruan Otomotif (Mekanik Alat Berat)	BLKM	98,86	100	100	99,43	100
39.	Pendidikan dan pelatihan bagi Pencari Kerja Kejuruan Listrik	BLKM	99,20	100	100	99,60	100
40.	Pendidikan dan Pelatihan bagi Pencari Kerja Kejuruan Bangunan (Meublier)	BLKM	97,43	100	100	98,72	100

### 3.5. Evaluasi Realisasi Program Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai timur Tahun 2015

Dari pengukuran realisasi program kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015, terlihat bahwa realisasi program kerja dari masing-masing Sekretariat, Sub. Bagian, Sub. Dinas dan Seksi sebagai berikut :

- Realisasi Program Kerja Sekretariat yang terdiri dari masing – masing program kerja Sub Bagian mencapai 100 %.



- Realisasi Program Kerja Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan yang terdiri dari masing-masing program kerja Seksi rata-rata mencapai 98.73 %.
- Realisasi Program kerja Bidang Pelatihan dan Penempatan Perluasan Kerja yang terdiri dari masing – masing program kerja Seksi rata-rata mencapai 99.03 %.
- Realisasi Program Kerja Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek yang terdiri dari masing-masing program kerja Seksi rata-rata mencapai 99.00 %.
- Realisasi Program Kerja Bidang Transmigrasi yang terdiri dari masing-masing program kerja seksi rata-rata mencapai 92.03 %.
- Realisasi Program Kerja BLK Mandiri yang terdiri dari masing-masing program kerja seksi rata-rata mencapai 100 %

## **BAB IV P E N U T U P**

Penyusunan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur dimaksudkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan serta program. LAKIP disusun sebagai tindak lanjut Keputusan Presiden RI nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Ketua LAN RI nomor 589/IX 99 tanggal 20 September 1999. Laporan ini menggambarkan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur antara lain :

1. Peningkatan Profesionalisme dan Kinerja Aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam pelaksanaan Otonomi Daerah di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian;
2. Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja, perluasan Kesempatan kerja dan Perencanaan Tenaga Kerja dan terserapnya pengangguran di Kabupaten Kutai Timur ;
3. Terwujudnya pengembangan Hubungan Industrial yang harmonis, Dinamis dan berkeadilan untuk terciptanya Kesejahteraan Tenaga Kerja dan Kemajuan Dunia Usaha;



4. Peningkatan Kesejahteraan dan perlindungan Tenaga Kerja melalui pengawasan dan peningkatan hukum ketenagakerjaan dan perlindungan Hak-hak pekerja melalui pengawasan pelaksanaan pengupahan dan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
5. Peningkatan Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan serta Peningkatan Sistem Manajemen Ketenagakerjaan;
6. Terwujudnya Pelaksanaan Program Ketransmigrasian yang sinergis untuk Kepentingan Otonomi Daerah serta pembinaan dan pengembangan Wilayah Transmigrasi;
7. Meningkatkan Sarana, Prasarana, Kualitas dan Kuantitas aparatur yang profesional. Misalnya terpenuhinya rapat – rapat koordinasi Dalam dan Luar Daerah, Pelatihan dan Peningkatan kualitas SDM serta tersedianya perlalatan kantor;
8. Tersedianya Buku – buku Bacaan dan peraturan Perundang – undangan di perpustakaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur;
9. Meningkatnya Kesiapan Tenaga Kerja sesuai Bursa Tenaga Kerja yang diminati dan mendorong pengusaha untuk Meningkatkan Mutu / Kualitas Tenaga Kerja.

Berdasarkan skala ordinal maka capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur dapat dikategorikan berhasil ( sesuai dengan penyusunan pelaksana / akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, keputusan LAN RI nomor 589 / IX / 99 tanggal 20 September 1999 ).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan Good Governance yang melibatkan Stake Holders sehingga kedepan akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur dibuat sebagai bentuk dan transparansi terhadap masyarakat, terima kasih.

Sangatta, 09 Februari 2016

Kepala Dinas

**H. Abdullah Fauzie, SH,M.Hum**

Pembina Utama Muda ( IV/c)

NIP. 19570705 197803 1 015





## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah Tyhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Kutai Timur dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 sebagai pertanggungjawaban implementasi dari Rencana Stratejik tahun 2010 – 2015 dan Rencana Kinerja tahun 2015.

LAKIP ini merupakan akhir dari serangkaian perencanaan kinerja, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja Disnakertrans Kabupaten Kutai Timur, selama tahun 2013. Penyusunan LAKIP ini sesuai surat Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Mudah-mudahan LAKIP ini dapat memberikan manfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kutai Timur , 09 Februari 2016

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kepala Dinas  
Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Kabupaten Kutai Timur

**H.ABDULLAH FAUZIE,SH,M.Hum**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19570705 197803 1 015

## DAFTAR ISI

i

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>TIM PENYUSUN</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Penyusunan LAKIP Tahun 2015.....	1
1.2. Dasar Hukum.....	2
1.3. Ikhtisar Eksekutif.....	3
1.4. Bidang Kewenangan dan Prangkat Daerah.....	4
1.5. Sistematika penyajian.....	8
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b> .....	<b>15</b>
2.1 Rencana Strategik .....	15
2.1.1. Visi dan Misi .....	15
2.1.2. Tujuan dan Sasaran .....	16
2.1.3. Kebijakan dan Program .....	19
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2015.....	20
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>22</b>
3.1. Pengukuran Kinerja .....	22
3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja .....	24
3.3. Akuntabilitas Keuangan .....	27
3.4. Analisis Efisiensi dan Efektivitas.....	29
3.5. Evaluasi Realisasi Program Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2015.....	31
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>26</b>
4.1. Keberhasilan .....	26



4.2	Kendala dan Hambatan .....	29
4.3	Strategi Penyelesaian Masalah .....	29

**LAMPIRAN –LAMPIRAN**

1. Penetapan Kinerja Kegiatan
2. Progres Fisik dan Keuangan
3. Daftar Inventaris Barang

**TIM PENYUSUN LAKIP TAHUN 2015  
DISNAKERTRANS KABUPATEN KUTAI TIMUR**

ii

- Penanggung Jawab : H.ABDULLAH FAUZIE,SH,M.Hum  
Kepala Dinas
- Ketua : Drs.WINARSO BUDI WIBOWO,M.Si  
Sekretaris
- Sekretaris : Hj. Rosida, ST  
Ka. Subag Perencanaan dan Program
- Bendahara : Sunarmi, STP
- Anggota : 1. Ka. Bidang Pengawasan  
2. Ka. Bidang Penempatan Tenaga Kerja  
3. Ka. Bidang Hubungan Industrial  
4. Ka. Bidang Transmigrasi  
5. Para Kasi dan Ka. Subag di lingkup Disnakertrans  
Kab. Kutai Timur



Kutai Timur, 09 Februari 2016

Kepala Dinas  
Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Kabupaten Kutai Timur

**H.ABDULLAH FAUZIE,SH,M.Hum**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19570705 197803 1 015

Lampiran

Lampiran (Ak) Tahun  
2016